

ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI KELURAHAN AGROWISATA KECAMATAN RUMBAI BARAT KOTA PEKANBARU

Rahmanida Fajrin¹, Dadang Mashur², Aris Bintania³

¹²Universitas Riau

³STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

rahmanida.fajrin3670@student.unri.ac.id¹, dadang.mashur@lecturer.unri.ac.id²,
bintania@stainkepri.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Adaptive Governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan program. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling* yang melibatkan unsur pemerintah, pengurus ProKlim, ketua RT/RW, kader Posyandu, kader Jumantik, dan Kelompok Wanita Tani. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Adaptive Governance* diwujudkan melalui kolaborasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, penguatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas serta pemanfaatan pengetahuan dalam pengambilan keputusan, dan kepemimpinan adaptif yang mendorong inovasi tata kelola secara berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Adaptive Governance* merupakan pendekatan yang efektif dalam mewujudkan tata kelola lingkungan berbasis masyarakat yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Adaptive Governance*, Program Kampung Iklim, Kolaborasi

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Adaptive Governance in the Climate Village Program (ProKlim) in Agrowisata Village, Rumbai Barat District, Pekanbaru City, and to identify the factors supporting the program's success. This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Informants were selected using purposive sampling and consisted of government officials, ProKlim administrators, neighborhood leaders, community health volunteers (Posyandu), mosquito larvae monitoring volunteers (Jumantik), and members of the Women Farmers Group. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The findings reveal that Adaptive Governance was implemented through meaningful collaboration and coordination among stakeholders, strengthening social capital and community empowerment, capacity development and knowledge-based decision-making, as well as

adaptive leadership that encouraged continuous governance innovation. The study concludes that Adaptive Governance is an effective approach to developing collaborative, adaptive, and sustainable community-based environmental governance.

Keywords: *Adaptive Governance, Climate Village Program, Collaboration*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global yang memberikan dampak multidimensional terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Peningkatan suhu bumi, perubahan pola curah hujan, serta semakin tingginya frekuensi kejadian cuaca ekstrem menyebabkan berbagai sektor mengalami tekanan yang cukup serius, terutama sektor pertanian yang sangat bergantung pada kestabilan kondisi iklim. Dampak tersebut tidak hanya memengaruhi produktivitas lahan dan ketahanan pangan, tetapi juga berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah berkembang menjadi persoalan pembangunan yang memerlukan keterlibatan berbagai aktor dalam menciptakan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi agenda strategis yang harus dilaksanakan secara terpadu mulai dari tingkat nasional hingga tingkat lokal agar masyarakat mampu meningkatkan ketahanan terhadap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim (W. Y. Santoso, 2025).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis yang beragam termasuk salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Berbagai laporan menunjukkan bahwa meningkatnya intensitas banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta menurunnya produktivitas pertanian merupakan konsekuensi nyata dari perubahan iklim yang sedang berlangsung (Selvi Agustin et al., 2024). Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sektor pertanian menjadi sektor yang paling terdampak akibat perubahan pola musim dan meningkatnya kejadian iklim ekstrem. Kondisi tersebut berimplikasi pada penurunan hasil panen, meningkatnya risiko gagal panen, serta berkurangnya pendapatan masyarakat petani. Oleh sebab itu, keberhasilan pengendalian perubahan iklim tidak dapat hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, akademisi, serta masyarakat sebagai pelaku utama dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing (Danar, 2022).

Salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program ini dirancang sebagai gerakan

nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara partisipatif. Melalui ProKlim, masyarakat didorong untuk mengembangkan berbagai inovasi berbasis potensi lokal, seperti pengelolaan sampah, konservasi air, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit akibat perubahan iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penguatan kelembagaan masyarakat (Zulkarnaini & Mashur, 2019). Pelaksanaan program tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian penghargaan, tetapi juga diarahkan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, ProKlim merupakan salah satu bentuk tata kelola lingkungan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang secara aktif mengimplementasikan Program Kampung Iklim melalui berbagai lokasi yang tersebar pada beberapa kecamatan. Hingga saat ini telah terdapat sejumlah lokasi ProKlim yang memperoleh kategori Pratama, Madya, maupun Utama sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Kota Pekanbaru hingga saat ini memiliki 16 lokasi kampung iklim, yakni 5 lokasi kampung iklim dengan kategori pratama yaitu:

Tabel 1.

Lokasi ProKlim yang memperoleh kategori Pratama, Madya, maupun Utama sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016

No.	Pratama	Madya	Utama
1.	Proklm RW 04 Kel. Tangkerang Labuai Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru	Proklm Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru	Proklm Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru
2.	Proklm RW 13 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai	Proklm RW 05 Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru	Proklm RW 02 Kel. Tobek Godang Kec. Tampan Kota Pekanbaru
3.	Proklm RW 12 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai	Proklm Pondok Pesantren Ibnu Al Mubarak Rw 003 Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Barat	Proklm RW 03 Kel. Tobek Godang Kec. Binawidya Kota Pekanbaru
4.	Proklm RW 06 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Proklm RW 13 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru	Proklm RW 05 Kel. Agrowisata Kec. Rumbai Barat Kota Pekanbaru Provinsi Riau (disertai trophy)
5.	Proklm Kel. Sekip Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau.	Proklm RW 07 Kel. Tobekgodang Kec. Binawidya Kota Pekanbaru	
6.		Proklm RW 16 Kel.	

		Tobekgodang Binawidya Kota Pekanbaru	Kec.	
--	--	---	------	--

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan (2024).

Di antara berbagai lokasi tersebut, Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat menjadi satu-satunya kawasan yang berhasil memperoleh penghargaan ProKlim kategori Utama disertai Trophy. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Agrowisata mampu melaksanakan berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara konsisten sehingga memperoleh pengakuan di tingkat nasional. Prestasi tersebut menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam karena diraih oleh wilayah yang sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan perkebunan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim.

Kelurahan Agrowisata memiliki karakteristik wilayah yang menjadikan pelaksanaan Program Kampung Iklim memiliki tantangan tersendiri. Sebagian besar penggunaan lahan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan sehingga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim. Risiko kekeringan pada musim kemarau, potensi kebakaran lahan, meningkatnya ancaman penyakit berbasis lingkungan, serta kebutuhan terhadap ketersediaan sumber air merupakan berbagai persoalan yang harus dihadapi secara berkelanjutan. Meskipun demikian, masyarakat Kelurahan Agrowisata mampu mempertahankan keberhasilan pelaksanaan ProKlim melalui berbagai inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian program tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan tata kelola yang mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat (observasi, 2025).

Keberhasilan Kelurahan Agrowisata dalam meraih penghargaan ProKlim kategori Utama disertai Trophy mengindikasikan adanya praktik tata kelola yang adaptif dalam penyelenggaraan program. Tata kelola tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administrasi pemerintahan, melainkan sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, mengelola sumber daya, mengambil keputusan, serta menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama. Dalam konteks perubahan iklim yang bersifat dinamis dan penuh ketidakpastian, pendekatan *Adaptive Governance* menjadi relevan karena menekankan pentingnya fleksibilitas, kolaborasi, pembelajaran berkelanjutan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial maupun ekologis (Winoto, 2026). Oleh karena itu, keberhasilan ProKlim di Kelurahan Agrowisata tidak hanya menarik ditinjau dari aspek capaian program, tetapi juga penting dianalisis melalui perspektif *Adaptive Governance* untuk memahami bagaimana proses tata kelola tersebut mampu membangun ketahanan

masyarakat terhadap perubahan iklim secara berkelanjutan (Sahira & Zulkarnaini, 2023).

Penelitian mengenai *Adaptive Governance* dalam pengelolaan lingkungan telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian Y. M. D. Santoso & Rijanti (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program lingkungan sangat dipengaruhi oleh kemampuan tata kelola dalam membangun kolaborasi lintas aktor, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta mengembangkan mekanisme pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekologis. Sharma-Wallace et al. (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan *Adaptive Governance* ditentukan oleh delapan indikator utama, yaitu kolaborasi yang bermakna, koordinasi antarpemangku kepentingan, modal sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan menciptakan peluang tata kelola baru. Sementara itu, Norman et al. (2020) menegaskan bahwa tata kelola adaptif merupakan pendekatan yang mampu menjawab kompleksitas persoalan lingkungan melalui proses pembelajaran bersama, fleksibilitas kebijakan, dan keterlibatan berbagai aktor secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu juga telah mengkaji implementasi Program Kampung Iklim dari berbagai perspektif. Penelitian Yona Niko Putri & Magriasti (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan Program Kampung Iklim sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian Mandala et al. (2025) menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi ProKlim memerlukan dukungan kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola lingkungan yang efektif. Sementara itu, penelitian Choirul Fatwa Atta Ani & Maemunah (2026) menemukan bahwa penguatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan komunitas, edukasi lingkungan, dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan Program Kampung Iklim di tingkat lokal.

Sebagian besar penelitian memfokuskan pembahasan pada efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengendalian perubahan iklim, tingkat partisipasi masyarakat, pemberdayaan komunitas, maupun evaluasi keberhasilan program berdasarkan indikator administrasi dan capaian penghargaan. Penelitian lainnya menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan, kepemimpinan lokal, serta kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam mendukung keberhasilan ProKlim di berbagai daerah. Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kebijakan lingkungan, namun umumnya masih menempatkan ProKlim sebagai objek evaluasi program sehingga belum secara komprehensif menguraikan bagaimana proses tata kelola adaptif berlangsung melalui interaksi antaraktor, pembelajaran kelembagaan,

penguatan modal sosial, serta mekanisme adaptasi yang berkembang selama implementasi program. Jadi, dimensi *Adaptive Governance* sebagai proses tata kelola yang dinamis masih relatif terbatas dikaji secara mendalam.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas keberhasilan ProKlim dari sisi hasil program (*program outcomes*) maupun tingkat partisipasi masyarakat, sedangkan aspek proses tata kelola yang memungkinkan keberhasilan tersebut masih belum banyak dijelaskan. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji implementasi Program Kampung Iklim menggunakan delapan indikator *Adaptive Governance* yang dikembangkan oleh Sharma-Wallace et al. (2018) secara utuh dalam satu kerangka analisis. Padahal, pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami hubungan antara kepemimpinan, kolaborasi, koordinasi, modal sosial, pengembangan kapasitas, pemanfaatan pengetahuan, serta inovasi kelembagaan sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi keberhasilan program. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis yang lebih komprehensif terhadap proses tata kelola adaptif pada pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *Adaptive Governance* sebagai kerangka utama untuk menjelaskan keberhasilan Program Kampung Iklim di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbi Barat Kota Pekanbaru. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji efektivitas program atau tingkat partisipasi masyarakat secara parsial, penelitian ini menganalisis keterkaitan delapan indikator *Adaptive Governance* dalam membentuk sistem tata kelola yang adaptif dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini mengambil lokasi pada satu-satunya kawasan ProKlim di Kota Pekanbaru yang berhasil meraih kategori Utama disertai Trophy, sehingga memberikan konteks empiris yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengembangan teori *Adaptive Governance*, tetapi juga memberikan model praktik tata kelola adaptif yang dapat direplikasi oleh daerah lain dalam mengembangkan program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana penerapan *Adaptive Governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbi Barat Kota Pekanbaru sehingga mampu menghasilkan keberhasilan program hingga memperoleh penghargaan kategori Utama disertai Trophy. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung terbentuknya tata kelola adaptif melalui kolaborasi, koordinasi, penguatan modal sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas, pemanfaatan data,

kepemimpinan, serta penciptaan peluang tata kelola yang berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan penerapan *Adaptive Governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru berdasarkan delapan indikator yang dikemukakan oleh Sharma-Wallace et al. (2018), sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program sebagai model tata kelola lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai penerapan *Adaptive Governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara alamiah melalui penelusuran makna, pengalaman, dan interaksi para aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan program (Sugiyono, 2017). Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa Kelurahan Agrowisata merupakan satu-satunya lokasi ProKlim di Kota Pekanbaru yang berhasil meraih penghargaan kategori Utama disertai Trophy pada tahun 2023. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Camat Rumbai Barat, Lurah Kelurahan Agrowisata, ketua RT/RW, ketua kader Posyandu, kader Jumantik, serta ketua Kelompok Wanita Tani sebagai pihak yang memahami pelaksanaan ProKlim. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen pendukung, seperti regulasi, laporan kegiatan, serta dokumen Program Kampung Iklim (Hennink et al., 2020). Selanjutnya, data dianalisis secara interaktif menggunakan model Miles et al. (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi *Adaptive Governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kelurahan Agrowisata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

***Adaptive Governance* dalam Membangun Kolaborasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim**

Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pengendalian perubahan iklim tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola yang adaptif melalui kolaborasi dan koordinasi yang efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan penelitian diketahui bahwa

sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, seluruh aktor yang terlibat memiliki peran yang saling melengkapi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan, masyarakat menjadi pelaku utama implementasi kegiatan, sedangkan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai perangkat daerah memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, pendampingan, penyediaan sarana, maupun penguatan kapasitas masyarakat. Pola hubungan yang saling mendukung tersebut menciptakan sistem kerja yang tidak bersifat sektoral, tetapi berkembang menjadi kemitraan yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersama, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Nashar & Jawiah, 2025).

Kolaborasi tersebut sejalan dengan indikator *Meaningful Collaboration Across Scales* yang dikemukakan Sharma-Wallace et al. (2018), yaitu kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor pada berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat secara bermakna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi di Kelurahan Agrowisata tidak hanya berlangsung secara formal melalui kerja sama yang didukung oleh surat keputusan, nota kesepahaman, maupun dukungan kelembagaan, tetapi juga berkembang secara informal melalui hubungan sosial yang telah lama terbangun di tengah masyarakat. Kolaborasi informal tersebut terlihat dari kebiasaan masyarakat yang saling membantu dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan pekarangan, hingga pelaksanaan kegiatan Posyandu, Jumantik, dan Kelompok Wanita Tani. Hubungan sosial yang telah terbangun sebelum hadirnya Program Kampung Iklim menjadi modal penting yang memudahkan masyarakat menerima berbagai inovasi lingkungan (Yona Niko Putri & Magriasti, 2022).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Kampung Iklim (Gintulangi et al., 2025). Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berperan sebagai *leading sector* yang mengoordinasikan pelaksanaan program, sedangkan organisasi perangkat daerah lainnya memberikan dukungan sesuai bidang tugas masing-masing, seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Selain unsur pemerintah, keterlibatan badan usaha seperti PLN Peduli, AirNav Indonesia, serta berbagai organisasi masyarakat turut memperkuat kapasitas kelembagaan ProKlim melalui bantuan sarana produksi pertanian, pembangunan rumah bibit, pengembangan Unit Pengolahan Sampah Terpadu (UPST), hingga penyelenggaraan pelatihan masyarakat. Keberadaan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa tata kelola adaptif memerlukan jaringan kemitraan yang luas sehingga setiap pihak dapat memberikan kontribusi sesuai sumber daya yang dimiliki.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi yang berjalan secara efektif di antara seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik formal maupun informal, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program. Koordinasi formal diwujudkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), rapat koordinasi lintas sektor, pertemuan rutin kelompok masyarakat, serta kegiatan sosialisasi yang melibatkan pemerintah daerah, pengurus ProKlim, dan masyarakat. Di sisi lain, koordinasi informal dilakukan melalui komunikasi langsung, kunjungan lapangan, serta pemanfaatan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp yang memudahkan pertukaran informasi secara cepat. Pola koordinasi yang fleksibel tersebut memungkinkan setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga menjadi instrumen pembelajaran bersama dalam menghadapi dinamika pelaksanaan Program Kampung Iklim (Choirul Fatwa Atta Ani & Maemunah, 2026).

Temuan tersebut menguatkan indikator *Effective Coordination Between Stakeholders and Levels* yang dikemukakan Sharma-Wallace et al. (2018), yaitu koordinasi yang mampu menghubungkan berbagai tingkatan pemerintahan, organisasi, dan masyarakat dalam suatu sistem tata kelola yang adaptif. Di Kelurahan Agrowisata, koordinasi berlangsung secara vertikal maupun horizontal. Koordinasi vertikal terlihat melalui hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, hingga kelompok masyarakat dalam menjalankan kebijakan ProKlim. Sementara itu, koordinasi horizontal berlangsung melalui kerja sama antarorganisasi masyarakat, kelompok tani, kader Posyandu, kader Jumantik, serta berbagai komunitas lokal yang saling berbagi informasi dan sumber daya. Kombinasi kedua bentuk koordinasi tersebut menghasilkan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat implementasi berbagai program lingkungan. Oleh karena itu, efektivitas koordinasi yang dibangun di Kelurahan Agrowisata menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat praktik *Adaptive Governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan Program Kampung Iklim hingga memperoleh penghargaan kategori Utama disertai Trophy.

Pelaksanaan koordinasi dalam Program Kampung Iklim di Kelurahan Agrowisata juga memperlihatkan adanya mekanisme koordinasi yang bersifat adaptif, yaitu memadukan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* secara seimbang. Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan arahan, pendampingan, serta regulasi sebagai dasar pelaksanaan ProKlim, sementara masyarakat diberikan ruang yang luas untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan solusi, serta mengembangkan berbagai inovasi sesuai karakteristik wilayahnya. Hasil

wawancara menunjukkan bahwa berbagai keputusan strategis, seperti pengembangan Unit Pengolahan Sampah Terpadu (UPST), penguatan ketahanan pangan, pembangunan embung, hingga pengelolaan bank sampah lahir melalui proses musyawarah yang melibatkan masyarakat bersama pemerintah dan mitra pembangunan. Pola koordinasi semacam ini mencerminkan adanya hubungan timbal balik yang tidak bersifat hierarkis, melainkan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah pengelolaan lingkungannya sendiri. Kondisi tersebut menjadi salah satu karakteristik utama *Adaptive Governance*, yaitu kemampuan sistem tata kelola untuk menyesuaikan mekanisme pengambilan keputusan terhadap dinamika persoalan yang dihadapi di tingkat lokal (Winoto, 2026).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan koordinasi sangat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi yang terbangun di antara para pemangku kepentingan. Komunikasi yang berlangsung secara terbuka memungkinkan pertukaran informasi, pengalaman, dan pengetahuan berlangsung secara berkelanjutan sehingga setiap aktor memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan arah pelaksanaan Program Kampung Iklim. Dalam praktiknya, komunikasi tidak hanya dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan formal, tetapi juga berlangsung secara informal melalui kunjungan lapangan, diskusi kelompok, maupun media komunikasi digital. Intensitas komunikasi tersebut memperkuat rasa saling percaya antaraktor, meminimalkan potensi konflik kepentingan, serta mempercepat proses penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Dari perspektif *Adaptive Governance*, komunikasi yang terbuka merupakan mekanisme penting dalam membangun kapasitas adaptif organisasi karena memungkinkan proses pembelajaran berlangsung secara terus-menerus serta mendorong munculnya berbagai inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Winoto, 2026).

Apabila dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai Program Kampung Iklim, hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik yang berbeda. Penelitian sebelumnya umumnya menempatkan kolaborasi sebagai bentuk dukungan antarlembaga dalam pelaksanaan program lingkungan atau hanya menyoroti tingkat partisipasi masyarakat sebagai indikator keberhasilan program. Sebaliknya, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi dan koordinasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme tata kelola adaptif yang membentuk jaringan kerja lintas sektor secara berkelanjutan. Hubungan antara pemerintah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan dunia usaha tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan tertentu, melainkan terus berkembang melalui proses saling belajar, berbagi sumber daya, dan menciptakan inovasi baru sesuai perubahan kebutuhan lingkungan. Temuan tersebut memperkuat pandangan Sharma-Wallace et al. (2018) bahwa kolaborasi yang bermakna bukan sekadar mempertemukan

berbagai aktor, tetapi mampu menghasilkan kapasitas kolektif dalam menghadapi ketidakpastian dan meningkatkan ketahanan sistem sosial-ekologis secara berkelanjutan.

Keberhasilan Program Kampung Iklim di Kelurahan Agrowisata tidak semata-mata disebabkan oleh tersedianya dukungan kebijakan pemerintah ataupun besarnya sumber daya yang dimiliki, melainkan karena adanya tata kelola adaptif yang dibangun melalui kolaborasi dan koordinasi yang berlangsung secara konsisten (Wismarwatiningih & Nugraheni, 2026). Kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor pada berbagai tingkatan mampu memperluas akses terhadap sumber daya, pengetahuan, teknologi, dan dukungan kelembagaan, sedangkan koordinasi yang efektif memastikan seluruh aktor bergerak menuju tujuan yang sama dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal (Nashar & Jawiah, 2025). Sinergi antara kedua aspek tersebut menghasilkan kemampuan kolektif dalam merespons berbagai tantangan perubahan iklim secara lebih cepat, fleksibel, dan berkelanjutan. Penerapan indikator *Meaningful Collaboration Across Scales* dan *Effective Coordination Between Stakeholders and Levels* sebagaimana dikemukakan Sharma-Wallace et al. (2018) terbukti menjadi fondasi utama dalam membangun praktik *Adaptive Governance* yang mampu mengantarkan Kelurahan Agrowisata meraih penghargaan Program Kampung Iklim kategori Utama disertai Trophy sekaligus menjadi model tata kelola lingkungan berbasis kolaborasi yang layak direplikasi pada wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

***Adaptive Governance* dan Inovasi Tata Kelola dalam Mewujudkan Keberlanjutan Program Kampung Iklim**

Keberhasilan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Agrowisata tidak terlepas dari peran kepemimpinan yang mampu mengarahkan, menggerakkan, dan memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lurah bersama pengurus ProKlim tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak perubahan (*agent of change*) yang mampu membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Kepemimpinan tersebut diwujudkan melalui pemberian motivasi, pendampingan, serta keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat (Lano, 2015). Pola kepemimpinan yang partisipatif tersebut mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap program yang dijalankan dan mendorong meningkatnya partisipasi dalam berbagai kegiatan ProKlim.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepemimpinan di Kelurahan Agrowisata lebih mengedepankan pendekatan kolaboratif dibandingkan pendekatan yang bersifat instruktif. Berbagai keputusan strategis selalu didahului dengan musyawarah bersama masyarakat, pengurus kelompok, serta para pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan

tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, maupun solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kebijakan pemerintah, tetapi juga merupakan hasil kesepakatan bersama yang memperoleh dukungan masyarakat (Hikmah & Yudiawan, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adaptif mampu menciptakan tata kelola yang lebih demokratis, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan indikator *Promoting Leadership Capacity* yang dikemukakan Sharma-Wallace et al. (2018), yang menjelaskan bahwa pemimpin dalam *Adaptive Governance* harus mampu membangun jejaring, memfasilitasi kolaborasi, serta menggerakkan berbagai aktor untuk beradaptasi terhadap perubahan. Dalam konteks Kelurahan Agrowisata, lurah dan pengurus ProKlim berhasil membangun hubungan kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha, maupun komunitas lingkungan. Kemitraan tersebut memberikan akses terhadap berbagai sumber daya, mulai dari pelatihan, bantuan peralatan, pendampingan teknis, hingga dukungan pendanaan. Keberhasilan membangun jejaring tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola organisasi internal, tetapi juga dari kemampuan memperluas kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan program (Sardi, 2017).

Selain membangun kemitraan, kepemimpinan adaptif juga mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mendukung keberlanjutan Program Kampung Iklim (Putri et al., 2025). Salah satu inovasi yang berkembang di Kelurahan Agrowisata adalah pembentukan Unit Pengolahan Sampah Terpadu (UPST) yang berfungsi mengelola sampah rumah tangga menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Melalui inovasi tersebut, permasalahan sampah tidak lagi dipandang sebagai beban lingkungan, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UPST juga memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan volume sampah yang dibuang ke lingkungan serta mendorong berkembangnya ekonomi sirkular berbasis masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa inovasi tata kelola tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, tetapi berkembang pada pemanfaatan teknologi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa inovasi yang diterapkan antara lain pemanfaatan sistem penyiraman tanaman berbasis penampungan air hujan, penggunaan pupuk organik hasil pengolahan limbah, pengembangan bank sampah, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana koordinasi dan penyebaran informasi. Inovasi-inovasi tersebut lahir dari proses pembelajaran bersama antara masyarakat, pemerintah, dan mitra pembangunan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan

yang dihadapi akibat perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan berinovasi menjadi salah satu bentuk adaptasi masyarakat dalam menghadapi dinamika lingkungan yang terus berubah.

Temuan tersebut memperkuat indikator *Exploiting or Creating Governance Opportunities* yang dikembangkan Sharma-Wallace et al. (2018), yaitu kemampuan memanfaatkan maupun menciptakan peluang baru untuk memperkuat tata kelola. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Kelurahan Agrowisata tidak hanya memanfaatkan peluang yang diberikan melalui Program Kampung Iklim, tetapi juga mampu menciptakan berbagai peluang baru yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbagai penghargaan yang diraih, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, berkembangnya jejaring kemitraan, serta lahirnya berbagai inovasi lokal merupakan bukti bahwa tata kelola adaptif mampu menghasilkan peluang-peluang baru yang mendukung keberlanjutan program (Dermawan et al., 2024). Keberhasilan ProKlim tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, tetapi berkembang menjadi proses pembelajaran yang terus menghasilkan inovasi.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adaptif tidak hanya berfungsi sebagai faktor pendukung keberhasilan program, tetapi menjadi katalisator yang memperkuat seluruh elemen *Adaptive Governance*. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti kepemimpinan sebagai fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan, sedangkan penelitian ini menemukan bahwa kepemimpinan juga berperan dalam membangun budaya inovasi, memperluas jejaring kolaborasi, serta membuka peluang pengembangan kelembagaan masyarakat. Dengan kata lain, kepemimpinan adaptif tidak hanya mengarahkan pelaksanaan program, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat terus berkembang dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

SIMPULAN

Keberhasilan pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru merupakan hasil dari penerapan *Adaptive Governance* yang terimplementasi melalui kolaborasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, penguatan modal sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas serta pemanfaatan pengetahuan dalam pengambilan keputusan, dan kepemimpinan adaptif yang mampu mendorong inovasi tata kelola secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai organisasi masyarakat telah membentuk sistem tata kelola yang responsif terhadap dinamika perubahan iklim sekaligus memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat dalam mengelola lingkungan secara mandiri. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan ProKlim tidak semata-mata ditentukan oleh dukungan kebijakan

atau ketersediaan sumber daya, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan membangun tata kelola yang kolaboratif, partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan *Adaptive Governance* dapat menjadi model pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang layak direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik serupa. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian secara komparatif pada beberapa lokasi ProKlim dengan kategori yang berbeda atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi *Adaptive Governance* dalam pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Choirul Fatwa Atta Ani, & Maemunah, M. (2026). Efektivitas Program Kampung Iklim (ProKlim) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Padukuhan Sangurejo Kapanewon Turi Kabupaten Sleman. *Journal Publicuho*, 9(1), 459–469. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v9i1.1046>
- Danar, O. R. (2022). *Teori Governance*. Deepublish.
- Dermawan, F. S., Widhiandono, H., Suyoto, & Alfalisyanto, A. (2024). Pengaruh Beban Kerja, Disiplin Kerja, dan Iklim Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Perangkat Desa Se-Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 11(4), 322–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v11i4.1416>
- Gintulangi, S. O., Latala, F. H. H., Nusu, O. S., & Hasan, K. K. (2025). Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Kawasan Pesisir Teluk Tomini. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12(4), 1521–1537. <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v12i4.2071>
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative Research Methods*. SAGE Publications.
- Hikmah, A. N., & Yudiawan, A. (2019). Manajemen dan Kebijakan Madrasah melalui Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan. *Al-Fikr*, 5(1), 111–127. <https://doi.org/10.47945/alfikr.v5i1.16>
- Lano, P. F. (2015). Fungsi Kepemimpinan Untuk Mengurangi Sikap Arogansi Pegawai. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i1.89>
- Mandala, E., Setyadiharja, R., Mukhlis, S., Siam, N. U., & Firdaus, Z. (2025). Implementasi Program Kampung Iklim Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 204–214. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v6i2.256>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A*

Methods Sourcebook. SAGE Publications.

- Nashar, A., & Jawiah, S. (2025). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Praktik Strategis*. Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Norman, N. A., Razak, A. R., & Kasmad, R. (2020). *Adaptive Governance* dalam Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Mamuju. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 145–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/kimap.v1i1.3729>
- Putri, D. A., Arifana, D. W., Kalimatussadah, N., Nurzahra, N., & Rosana, M. (2025). Implementasi Program Kampung Iklim Dinas Lingkungan Hidup di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut. *ARSY: Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat*, 6(3), 841–846. <https://doi.org/https://doi.org/10.55583/arsy.v6i3.1741>
- Sahira, N. I., & Zulkarnaini, Z. (2023). Tata Kelola Destinasi Wisata Melalui Sistem Informasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (SIPAREKRAF) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling*, 1(2), 55–62. <https://doi.org/10.57235/jamparing.v1i2.1016>
- Santoso, W. Y. (2025). Kebijakan Nasional Indonesia dalam Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 371. <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i3.116>
- Santoso, Y. M. D., & Rijanti, T. (2022). Pengaruh Stres Kerja, Beban Kerja, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Daiyaplas Semarang. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 926 – 935. <https://doi.org/https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.812>
- Sardi. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Terhadap Kinerja bawahan melalui Kepuasan Kerja. *Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi*, 8(1). <https://journal.umy.ac.id/index.php/bti>
- Selvi Agustin, Nadya Putri Cantika, Mukhammad Nashrulloh, & Nur Isroatul Khusna. (2024). Konsekuensi Perubahan Iklim pada Pertanian Lokal di Pakel Tulungagung terhadap Harga Pangan di Pasar. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 44–57. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i2.1070>
- Sharma-Wallace, L., Velarde, S. J., & Wreford, A. (2018). *Adaptive Governance* good practice: Show me the evidence! *Journal of Environmental Management*, 222(1), 174–184. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.067>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Winoto, S. (2026). *Adaptive Governance dalam Transisi Pandemi Menuju Endemi*. UB

Press.

- Wismarwatiningsih, C. B., & Nugraheni, K. S. (2026). Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Motivasi dan Kinerja Aparatur Di Desa Mlilir. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 13(1), 151–161. <https://doi.org/10.37606/publik.v13i1.2194>
- Yona Niko Putri, & Magriasti, L. (2022). Peningkatan Upaya Adaptasi dan Mitigasi dalam Program Kampung Iklim di Nagari Paru Sijunjung. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(3), 243–252. <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.54>
- Zulkarnaini, Z., & Mashur, D. (2019). Development of Local Economic Independence Through Optimizing of Village Fund Management. *Iapa Proceedings Conference*, 298. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2018.203>